



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 256 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK

HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul yang memasuki masa pensiun, perlu dilakukan perubahan anggota Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk Hukum Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2020.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 256 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN BANTUL

No.	JABATAN	NAMA	Honorarium per Bulan
1	3	2	4
1.	Bupati Bantul	Drs. Suharsono	Rp300.000,00
2.	Wakil Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih	Rp250.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Helmi Jamharis, M.M.	Rp250.000,00
4.	Plt. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Hermawan S, S.IP., M.H.	Rp250.000,00
5.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.IP, M.Hum	Rp250.000,00
6.	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Agus Sriyana, S.H.	Rp250.000,00
7.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Drs. Kurniantara, M.Si.	Rp250.000,00
8.	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Suryanti, S.IP., M.Kom.	Rp250.000,00

1	2	3	4
9.	Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Afif Umahatun, S.H.	Rp250.000,00
10.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ambar Sutadi, S.H.	Rp250.000,00
11.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.	Rp250.000,00
12.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.	Rp250.000,00
13.	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Fatkhul Huda, A.Md.	Rp200.000,00
14.	Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	Yeni Indarti	Rp180.000,00
13.	Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Ngadinem 2. Payung Alam AF, S.H. 3. Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H. 4. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP. 5. Sutri Prihartini 6. Lukmiyati 7. Atim Nastiari 8. Sokiyem 9. Panggung Sutrisna	Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp200.000,00 Rp200.000,00 Rp185.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00 Rp180.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO